

Kurikulum Sejarah di Indonesia Tahun 1947-1965

Sulmi¹, Bahri²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: sulmisejarah@gmail.com¹, bahri@unm.ac.id²

Article History:

Received: 05 Mei 2025

Revised: 25 Mei 2025

Accepted: 27 Mei 2025

Keywords: *Kurikulum Sejarah, Ideologi Politik, Identitas Nasional*

Abstract: *Artikel ini mengkaji transformasi kurikulum sejarah di Indonesia selama periode 1947–1965 dalam konteks dinamika politik dan ideologi nasional. Melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis tiga kurikulum utama: 1947, 1952, dan 1964. Kurikulum 1947 dirancang untuk menanamkan semangat nasionalisme dan karakter kebangsaan melalui pendidikan sejarah yang terintegrasi dengan seni dan jasmani. Kurikulum 1952 menghadirkan struktur yang lebih sistematis dengan program Pancawardhana, namun pelaksanaannya dipengaruhi pertarungan ideologi antar partai politik di masa demokrasi parlementer. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kurikulum 1964 menjadi alat ideologis negara untuk membentuk “manusia sosialis Indonesia” yang setia pada Manipol-USDEK dan ideologi Nasakom. Kajian ini menunjukkan bahwa kurikulum sejarah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pedagogis, tetapi juga sebagai alat politik untuk membentuk identitas nasional dan memori kolektif yang mendukung legitimasi kekuasaan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan kritis dalam memahami relasi antara pendidikan, politik, dan ideologi dalam historiografi pendidikan Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pendidikan sejarah memegang peran krusial dalam pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Melalui pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu, generasi muda dapat mengenali akar budaya, nilai-nilai luhur, serta perjuangan kolektif yang membentuk jati diri bangsa. Kurikulum sejarah berfungsi sebagai alat negara dalam membingkai narasi sejarah resmi, yang tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membentuk perspektif dan kesadaran historis peserta didik. Dengan demikian, pendidikan sejarah bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan juga proses konstruksi ideologis yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, dan semangat persatuan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan sejarah menjadi sarana penting untuk memperkuat rasa kebangsaan di tengah keberagaman budaya dan tantangan globalisasi. Melalui kurikulum yang dirancang secara kontekstual dan relevan, pendidikan sejarah dapat membentuk karakter generasi muda yang sadar akan identitas nasionalnya dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa (Susilo et al., 2025).

Pasca-kemerdekaan, Indonesia menghadapi ketidakstabilan politik dan pencarian identitas nasional yang belum tuntas. Dalam situasi ini, kurikulum pendidikan, khususnya sejarah, menjadi alat strategis untuk membentuk narasi kebangsaan. Kurikulum 1947 menekankan nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila sebagai dasar pendidikan, mencerminkan semangat kemerdekaan dan upaya membangun sistem pendidikan nasional (Raharjo, 2025). Perubahan rezim dan dinamika politik pada periode 1947–1965 berdampak signifikan terhadap arah dan isi kurikulum sejarah, mencerminkan upaya negara dalam membingkai identitas nasional melalui pendidikan. Kurikulum sejarah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan pengetahuan masa lalu, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai ideologis dan membentuk kesadaran kolektif yang mendukung legitimasi kekuasaan yang sedang berkuasa. Dengan demikian, analisis terhadap perubahan kurikulum sejarah pada periode ini penting untuk memahami bagaimana pendidikan digunakan sebagai instrumen dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia (Rosser et al., 2022).

Kajian mendalam mengenai transformasi kurikulum sejarah Indonesia pada periode 1947–1965 masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung menyoroti aspek pedagogis atau implementatif, tanpa menguraikan secara mendalam dimensi politik dan ideologis yang membentuk narasi sejarah dalam kurikulum. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana kurikulum disusun dan diubah dalam konteks politik yang berbeda, serta bagaimana narasi sejarah digunakan sebagai alat untuk membentuk identitas nasional sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Studi yang secara khusus menelaah kurikulum sejarah sebagai produk politik dan ideologi masih sangat terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika tersebut. Analisis terhadap perubahan kurikulum sejarah pada periode ini penting untuk memahami bagaimana pendidikan digunakan sebagai instrumen dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia (Subkhan, 2018).

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis transformasi kurikulum sejarah Indonesia dalam tiga periode penting, yakni 1947, 1952, dan 1964, yang mencerminkan dinamika politik nasional pada masa transisi kemerdekaan hingga awal Orde Lama. Kajian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci: bagaimana isi dan pendekatan kurikulum sejarah berubah selama rentang waktu tersebut, serta sejauh mana faktor politik dan ideologis memengaruhi perumusan kurikulum sejarah oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah implikasi dari perubahan tersebut terhadap arah pendidikan nasional, terutama dalam membentuk identitas kebangsaan, legitimasi kekuasaan, serta penguatan nilai-nilai ideologis yang berbeda-beda sesuai dengan rezim yang berkuasa selama periode 1947 hingga 1965.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika kurikulum sejarah Indonesia sebagai cermin dari perubahan politik nasional antara tahun 1947 hingga 1965. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kurikulum sejarah beradaptasi dan dipengaruhi oleh kondisi politik yang berkembang pada setiap periode, serta bagaimana narasi sejarah yang diajarkan mencerminkan ideologi pemerintah yang berkuasa. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian historiografi pendidikan dan kurikulum dengan menyoroti peran ideologi dalam pembentukan kurikulum sejarah. Penelitian ini juga mendorong pemahaman kritis mengenai relasi antara pendidikan, ideologi, dan kekuasaan, serta implikasinya terhadap pembentukan identitas nasional Indonesia dalam konteks sosial dan politik yang terus berubah.

LANDASAN TEORI

Teori Pendidikan Sejarah

Pendidikan sejarah memiliki peran sentral dalam pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Melalui pemahaman terhadap peristiwa masa lalu, individu dapat mengenali akar budaya, nilai-nilai, serta perjuangan kolektif yang membentuk jati diri bangsa. Pendidikan sejarah tidak hanya menyajikan fakta-fakta historis, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang proses sejarah yang membentuk identitas nasional dan mendorong kesadaran kolektif. Dalam konteks ini, pendidikan sejarah berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat rasa kebangsaan dan keutuhan bangsa di tengah keragaman budaya dan etnis. Namun, dalam praktiknya, pendidikan sejarah juga dapat menjadi proses konstruksi ideologis, di mana narasi sejarah dipilih dan diajarkan untuk membentuk pandangan tertentu yang mendukung kepentingan politik dan sosial tertentu. Sejarah yang diajarkan dalam kurikulum sering kali mencerminkan interpretasi yang diinginkan oleh penguasa, sehingga membentuk kesadaran dan identitas nasional sesuai dengan ideologi yang dominan pada masa itu (Sumardin & Henri, 2024).

Dalam pendidikan sejarah, terdapat dua pendekatan utama: transmisi dan kritis. Pendekatan transmisi menekankan penyampaian fakta-fakta sejarah secara linear dan kronologis, di mana siswa berperan sebagai penerima informasi pasif. Sebaliknya, pendekatan kritis mengajak siswa untuk aktif menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan peristiwa sejarah dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk memahami bahwa sejarah bukan sekadar kumpulan fakta, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks politik dan ideologi tertentu. Penerapan pendekatan kritis dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan keterampilan berpikir analitis dan kritis siswa, serta membentuk kesadaran historis yang lebih mendalam. Namun, implementasi pendekatan ini memerlukan pelatihan khusus bagi guru dan penyediaan sumber belajar yang beragam untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif (All & Bahri, 2025).

Teori Kurikulum dan Pembentukan Identitas

Teori kurikulum mencakup pendekatan formal dan informal yang berperan dalam membentuk kesadaran sosial dan politik peserta didik. Kurikulum formal, yang terstruktur dan sistematis, dirancang oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sementara itu, kurikulum informal berkembang melalui interaksi sosial di lingkungan keluarga, komunitas, dan media, yang turut membentuk nilai dan sikap individu. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam membentuk kesadaran sosial dan politik, dengan kurikulum formal memberikan dasar pengetahuan dan kurikulum informal memperkuat melalui pengalaman sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman terhadap teori kurikulum yang mencakup kedua pendekatan ini penting untuk merancang pendidikan yang efektif dalam membentuk warga negara yang sadar sosial dan politik (Indy et al., 2019).

Kurikulum memainkan peran strategis dalam membentuk identitas nasional melalui penyusunan narasi sejarah yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemilihan materi ajar, kurikulum dapat memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa. Namun, kurikulum juga dapat menjadi alat bagi penguasa untuk menyebarkan ideologi tertentu. Dalam konteks ini, materi sejarah yang diajarkan sering kali disesuaikan dengan kepentingan politik dan ideologi rezim yang berkuasa, sehingga membentuk pandangan dunia yang mendukung legitimasi kekuasaan tersebut. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru, kurikulum sejarah difokuskan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menguatkan narasi

tentang stabilitas dan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen politik yang dapat memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap sejarah dan identitas nasional (Amadi & Anwar, 2024).

Teori Politik dan Pendidikan

Pendidikan sejarah sering kali digunakan sebagai instrumen politik oleh rezim yang berkuasa untuk memperkuat kekuasaan dan menyebarkan ideologi tertentu. Melalui kurikulum yang dirancang secara sistematis, pemerintah dapat mengarahkan pemahaman sejarah sesuai dengan kepentingan politiknya. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru di Indonesia, pendidikan sejarah difokuskan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menguatkan narasi tentang stabilitas serta pembangunan nasional. Kebijakan pendidikan ini dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan, serta menggunakan kurikulum yang lebih efektif dan efisien berdasarkan pendekatan manajemen tertentu. Dengan demikian, pendidikan sejarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk kesadaran kolektif yang mendukung legitimasi kekuasaan yang sedang berkuasa (Utami et al., 2024).

Konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci menjelaskan bagaimana dominasi ideologis dapat terbentuk melalui konsensus sosial, bukan hanya melalui paksaan. Dalam konteks pendidikan, hegemoni terjadi ketika nilai-nilai dan pandangan dunia kelompok penguasa diterima secara sukarela oleh masyarakat sebagai kebenaran umum. Pendidikan sejarah berperan penting dalam proses ini, karena melalui penyusunan kurikulum dan materi ajar, negara dapat menyebarkan ideologi tertentu yang mendukung status quo. Sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan pendidikan untuk melanggengkan kekuasaan melalui pendekatan otoriter yang lembut, atau "*soft authoritarianism*", dengan menyebarkan ideologi tertentu melalui sistem pendidikan. Dengan demikian, pendidikan sejarah menjadi arena penting dalam pembentukan dominasi ideologis yang mendukung kekuasaan rezim yang berkuasa (Zulkarnain, 2020).

Perspektif Historiografi Pendidikan

Historiografi pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Pada masa kolonial, historiografi pendidikan didominasi oleh perspektif kolonial yang menekankan superioritas budaya Barat. Setelah kemerdekaan, muncul upaya untuk merekonstruksi historiografi pendidikan yang lebih mencerminkan nilai-nilai nasional dan kearifan lokal. Penekanan pada pendidikan sebagai alat pembentukan identitas nasional menjadi fokus utama, dengan tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis budaya bangsa. Kurikulum pun disesuaikan untuk mencerminkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Namun, historiografi pendidikan masih menghadapi tantangan dalam menggambarkan keragaman pengalaman pendidikan di berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kritis untuk memahami kompleksitas sejarah pendidikan di Indonesia (Prakoso, 2018).

Negara memainkan peran sentral dalam penyusunan dan perubahan kurikulum sejarah di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah menggunakan pendidikan sejarah sebagai alat untuk membentuk identitas nasional dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Kurikulum sejarah disusun untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi yang sesuai dengan rezim yang berkuasa. Sebagai contoh, pada masa Orde Baru, kurikulum sejarah difokuskan untuk

menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menguatkan narasi tentang stabilitas serta pembangunan nasional. Kebijakan pendidikan ini dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan, serta menggunakan kurikulum yang lebih efektif dan efisien berdasarkan pendekatan manajemen tertentu. Dengan demikian, pendidikan sejarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk kesadaran kolektif yang mendukung legitimasi kekuasaan yang sedang berkuasa (Yuliana & Maysaroh, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau kajian literatur, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai referensi ilmiah terkait konsep kurikulum sejarah di Indonesia antara tahun 1947-1965. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen akademik lainnya yang membahas terkait kurikulum sejarah di Indonesia antara tahun 1947-1965. Studi pustaka merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui analisis teori dan hasil penelitian sebelumnya. Menurut Sugiyono (2017), metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang kredibel dan valid, kemudian mengorganisasikan serta menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.

Populasi dan Teknik Sampel

Populasi penelitian ini meliputi seluruh referensi literatur, baik berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang relevan dengan kurikulum sejarah di Indonesia tahun 1947-1965. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sumber-sumber yang dianggap kredibel, dan secara teoretis relevan. Kriteria pemilihan meliputi:

- Kesesuaian topik dengan fokus penelitian (kurikulum sejarah di Indonesia tahun 1947-1965).
- Kualitas dan reputasi penerbit atau jurnal.
- Keterbaruan data dan referensi yang mendukung konteks pendidikan saat ini.

Instrumen Penelitian

Untuk mendukung proses analisis data, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa:

- **Panduan Analisis Dokumen:** Sebuah lembar pedoman yang merinci aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam tiap sumber, seperti metodologi, arsip dokumen kurikulum sejarah di Indonesia antara tahun 1947-1965, dan penerapan dalam konteks pembelajaran.
- **Checklist Kriteria Seleksi:** Instrumen ini digunakan untuk menilai relevansi dan kredibilitas setiap referensi, sehingga hanya dokumen yang memenuhi standar tertentu yang akan dianalisis lebih lanjut.
- **Formulir Catatan Analisis:** Digunakan untuk mencatat hasil penelaahan dan interpretasi terhadap isi dokumen, termasuk identifikasi konsep, strategi, serta kendala yang diungkap dalam sumber tersebut.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- **Identifikasi dan Pengumpulan Data:** Peneliti mengumpulkan dokumen kurikulum sejarah tahun 1947, 1952, dan 1964 dari arsip nasional, pustaka resmi pemerintah, serta

sumber sekunder seperti jurnal akademik dan buku sejarah pendidikan. Proses ini juga mencakup telaah konteks sosial-politik masing-masing periode.

- **Seleksi Sumber:** Menggunakan pendekatan purposive sampling, peneliti memilih dokumen dan literatur yang secara langsung relevan dengan topik kurikulum sejarah dan dinamika politik nasional. Kriteria seleksi meliputi keaslian dokumen, keterkaitan substansi dengan pendidikan sejarah, serta latar ideologis yang terkandung.
- **Analisis Data:** Peneliti menggunakan teknik analisis isi historis terhadap kurikulum terpilih untuk mengidentifikasi struktur isi, tujuan pembelajaran, narasi sejarah dominan, serta pergeseran ideologis yang terjadi antarperiode. Analisis dilakukan secara komparatif dan kontekstual.
- **Sintesis dan Interpretasi:** emuan dari analisis dokumen disintesis untuk melihat pola kontinuitas dan perubahan dalam kurikulum sejarah. Interpretasi dilakukan berdasarkan perspektif kritis yang menekankan hubungan antara pendidikan, ideologi, dan kekuasaan. Hasil sintesis digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
- **Validasi Temuan:** Validasi dilakukan melalui triangulasi literatur, diskusi akademik dengan rekan sejawat, serta perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi logika interpretasi dan memperkuat keabsahan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Sejarah di Indonesia Tahun 1947

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pendidikan nasional yang mandiri. Sebelumnya, sistem pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda dan Jepang, yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan bangsa Indonesia. Dalam upaya membentuk identitas nasional yang kuat, pemerintah Indonesia mulai merancang kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter bangsa dan kesadaran bernegara. Kurikulum 1947, yang dikenal sebagai "Rencana Pelajaran 1947," menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan. Namun, implementasi kurikulum ini menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendidikan yang masih terbatas di berbagai daerah (Pasaribu, 2025).

Kurikulum 1947 dirancang untuk menanamkan semangat nasionalisme dan membangun identitas kebangsaan melalui pendidikan. Fokus utama kurikulum ini adalah pada pendidikan karakter, dengan menekankan nilai-nilai seperti cinta tanah air, kesadaran bernegara, dan semangat kebangsaan. Mata pelajaran sejarah Indonesia menjadi inti dari kurikulum, bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat. Kurikulum ini juga mengintegrasikan pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kesenian, dan pendidikan jasmani untuk membentuk individu yang seimbang secara intelektual dan moral. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter dan semangat kebangsaan, mengingat kondisi saat itu Indonesia baru saja merdeka dan sedang membangun jati diri bangsa. Dengan demikian, Kurikulum 1947 berupaya menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berjiwa nasionalis (Insani, 2019).

Pelaksanaan Kurikulum 1947 di daerah-daerah Indonesia menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan tenaga pendidik yang memahami isi dan semangat kurikulum baru. Banyak guru masih terikat pada pola pikir pendidikan kolonial dan belum mendapat pelatihan yang memadai. Selain itu, minimnya sarana prasarana seperti ruang

kelas, buku teks sejarah nasional, dan materi ajar lainnya menjadi kendala besar. Di daerah terpencil, akses ke sekolah pun masih sulit dijangkau. Kurikulum ini juga belum mencakup seluruh pengalaman belajar peserta didik, baik di dalam maupun luar kelas. konsep kurikulum Rentjana pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran, belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh peserta didik (Insani, 2019).

Kurikulum Sejarah di Indonesia Tahun 1952

Kurikulum 1952, yang dikenal sebagai *Rentjana Pelajaran Terurai 1952*, merupakan upaya awal pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang lebih terstandar dan terarah. Kurikulum ini disusun sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1947, dengan pendekatan yang lebih rinci terhadap isi pelajaran dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Langkah ini menjadi penting untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial yang tidak sesuai dengan semangat kebangsaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat integrasi bangsa dan membangun kesatuan sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat strategis dalam membentuk identitas nasional yang utuh dan merata. Kurikulum ini juga menandai awal mula peran negara yang lebih aktif dalam merancang isi pendidikan sesuai arah pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan silabus yang lebih jelas menunjukkan keinginan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran (Wahyuni, 2015).

Pengaruh politik parlementer di Indonesia pada awal 1950-an menciptakan suasana yang dinamis namun penuh tantangan, di mana berbagai partai dengan ideologi berbeda, seperti nasionalis, Islamis, dan komunis, berusaha untuk memperebutkan kekuasaan. Pertarungan ideologi ini tidak hanya terjadi di arena politik, tetapi juga merembet ke sektor pendidikan, khususnya dalam kurikulum sejarah, yang menjadi arena pertarungan ideologi antar kelompok tersebut. Setiap kabinet yang berkuasa berupaya menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kepentingan politiknya, yang sering kali mengakibatkan ketidakstabilan dan inkonsistensi dalam pengajaran sejarah. Akibatnya, generasi muda terpapar pada narasi yang beragam dan sering kali bertentangan, yang memengaruhi pemahaman mereka tentang identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi landasan bersama (Setiawan et al., 2018).

Kurikulum 1952 memusatkan pada program Pancawardhana yang mencakup daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran sudah diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi yaitu, moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Kurikulum 1952 menempatkan sejarah perjuangan kemerdekaan sebagai inti dari pengajaran sejarah, dengan tujuan menanamkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap bangsa. Tokoh-tokoh pahlawan seperti Soekarno, Hatta, Diponegoro, dan lainnya diangkat sebagai panutan, menggambarkan semangat perjuangan dan pengorbanan demi kemerdekaan. Materi pelajaran dirancang untuk membentuk karakter siswa yang cinta tanah air dan menghargai jasa para pahlawan. Pendekatan ini bertujuan membangun identitas nasional yang kuat di kalangan generasi muda, memastikan bahwa nilai-nilai perjuangan dan semangat kebangsaan terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia (Ananda & Hudaidah, 2021).

Kurikulum Sejarah di Indonesia Era Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan pendidikan, termasuk dalam pembentukan kurikulum sejarah. Dalam rangka menciptakan kesatuan ideologi nasional, Nasakom tidak hanya memengaruhi kehidupan politik,

tetapi juga diserap ke dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan pada masa ini diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi antaragama, serta pengertian terhadap komunisme sebagai bagian dari realitas sosial-politik Indonesia saat itu. Sekolah-sekolah dijadikan medium untuk membentuk peserta didik yang berpikiran sejalan dengan arah politik negara. Namun, integrasi Nasakom dalam pendidikan juga menimbulkan ketegangan, terutama antara nilai keagamaan dan ajaran komunisme, yang kemudian menjadi salah satu faktor konflik ideologis yang memuncak pasca-1965. Kondisi ini menunjukkan bagaimana pendidikan dijadikan alat politik untuk menyatukan kekuatan sosial yang berbeda dalam kerangka kepentingan negara (Subkhan, 2018).

Kurikulum 1964 disusun pada masa Demokrasi Terpimpin dan sangat dipengaruhi oleh semangat revolusi serta ideologi politik negara saat itu. Kurikulum ini bertujuan membentuk “manusia sosialis Indonesia” yang sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sejarah dalam kurikulum ini tidak lagi diajarkan secara netral, melainkan sebagai alat ideologis untuk membentuk kesadaran nasional dan memperkuat semangat revolusi. Sesuai Keputusan MPRS No. II/MPRS/1960, pendidikan diorientasikan untuk menghasilkan warga negara yang memiliki akhlak tinggi, siap bekerja di berbagai bidang, dan mampu menggerakkan kekuatan rakyat. Materi sejarah difokuskan pada perjuangan kemerdekaan dan peran tokoh revolusioner, sementara pendekatan pengajaran dirancang untuk mencetak generasi yang setia pada pemimpin dan ideologi negara. Dengan demikian, pendidikan sejarah dijadikan instrumen strategis untuk membentuk identitas politik dan loyalitas terhadap negara (Iramdan & Lengsi, 2019).

Pada masa demokrasi terpimpin, konten kurikulum dan buku teks sejarah berada dalam kendali penuh negara sebagai bagian dari strategi penguatan ideologi penguasa. Pemerintah menggunakan kurikulum untuk menanamkan narasi sejarah yang mendukung legitimasi politik Presiden Soekarno dan ideologi Nasakom. Kontrol ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan sejarah sejalan dengan tujuan politik dan ideologis negara, serta untuk membentuk persepsi siswa sesuai dengan narasi yang diinginkan pemerintah. Buku-buku sejarah yang beredar disusun dengan menekankan peran Soekarno sebagai tokoh utama kemerdekaan serta mengabaikan atau meminggirkan tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan secara ideologis. Dalam praktiknya, kontrol negara terhadap konten pelajaran dimaksudkan agar peserta didik memahami sejarah dalam kerangka pemikiran revolusioner yang pro terhadap pemerintah. Kurikulum menjadi alat ideologis yang menggambarkan dominasi kekuasaan negara dalam menentukan wacana pendidikan dan pengetahuan sejarah yang sah (Izmi, 2017).

Perbandingan dan Analisis Perubahan

Perubahan kurikulum sejarah Indonesia antara tahun 1947 hingga 1965 sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, ideologi, dan kepentingan kekuasaan yang berkembang pada masa itu. Pada periode awal kemerdekaan, kurikulum sejarah dirancang untuk membentuk karakter dan kesadaran bernegara melalui pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual. Namun, seiring dengan perubahan politik, terutama dengan munculnya Demokrasi Terpimpin pada 1959, kurikulum sejarah mulai diarahkan untuk mendukung ideologi Manipol-USDEK yang digagas oleh Presiden Sukarno. Ideologi ini menggabungkan Pancasila, UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan nasionalisme Indonesia sebagai landasan politik negara. Kurikulum 1964 dan 1968 semakin menekankan pada pembentukan manusia Pancasilais sejati melalui pendidikan sejarah yang berorientasi pada nilai-nilai revolusi dan nasionalisme (Safitri & Purwaningsih, 2016).

Peran negara dalam pengendalian narasi sejarah sangat dominan pada masa ini. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga terkait lainnya menetapkan kurikulum sebagai alat untuk menyebarkan ideologi resmi dan membentuk memori kolektif bangsa sesuai dengan kepentingan politik penguasa. Sebagai contoh, pada 1969, pemerintah menerbitkan buku "Sejarah Nasional Indonesia" yang menjadi standar resmi dalam pengajaran sejarah di sekolah-sekolah. Buku ini menekankan narasi yang mendukung Orde Baru, seperti menggambarkan Soeharto sebagai penyelamat bangsa dari ancaman PKI dan menyoroti peran positif pemerintah dalam menanggulangi Gerakan 30 September 1965. Sebaliknya, peran Presiden Sukarno dan kelompok-kelompok politik sebelumnya digambarkan secara negatif (Safitri & Purwaningsih, 2016).

Implikasi dari perubahan kurikulum sejarah ini terhadap pembentukan identitas nasional dan memori kolektif peserta didik sangat signifikan. Melalui kurikulum yang disusun berdasarkan kepentingan politik, generasi muda diajarkan untuk mengenal sejarah dari perspektif yang telah disaring dan disesuaikan dengan ideologi penguasa. Hal ini membentuk cara pandang mereka terhadap peristiwa sejarah dan tokoh-tokoh nasional, serta memperkuat identitas nasional yang sejalan dengan narasi resmi. Namun, pendekatan ini juga berisiko mengabaikan kompleksitas sejarah dan keberagaman pengalaman bangsa, yang seharusnya menjadi bagian integral dalam membangun memori kolektif yang inklusif dan autentik (Hasan, 2011).

KESIMPULAN

Transformasi kurikulum sejarah di Indonesia pada periode 1947–1965 mencerminkan eratnya hubungan antara pendidikan dan kekuasaan politik. Kurikulum 1947 dirancang untuk membentuk karakter bangsa dan semangat nasionalisme sebagai respons terhadap kebutuhan pascakemerdekaan. Kurikulum 1952 memperjelas struktur isi dan pengelompokan pembelajaran melalui program Pancawardhana, namun rentan terhadap pengaruh ideologi politik akibat situasi demokrasi parlementer yang tidak stabil. Sementara itu, kurikulum 1964 secara eksplisit dijadikan alat ideologis negara dalam masa Demokrasi Terpimpin, bertujuan membentuk peserta didik yang setia terhadap Manipol-USDEK dan ideologi Nasakom.

Ketiga kurikulum tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sejarah tidak semata-mata berperan sebagai sarana penyampaian fakta sejarah, melainkan sebagai instrumen negara untuk membentuk memori kolektif, identitas nasional, dan legitimasi politik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan kritis dalam kajian kurikulum dan pendidikan sejarah agar narasi yang disampaikan lebih objektif, inklusif, dan reflektif terhadap kompleksitas sejarah bangsa Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- All, M. A. A. H., & Bahri, B. (2025). Berpikir Sejarah dalam Pembelajaran Sejarah. *Indonesia Journal Of Education*, 2(1), 60–69.
- Amadi, A. S. M., & Anwar, N. (2024). Pembentukan Identitas Bangsa melalui Pendidikan : Analisis Filsafat Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 14902–14912.
- Ananda, A. P., & Hudaidah, H. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(2), 102–108. <https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1192>
- Hasan, S. H. (2011). History Education As an Educational Medium To Embody the Spirit of Nationality. *HISTORIA: International Journal of History Education*, 12(1), 55–66. <https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12117>

- Indy, R., Kandowangko, N., & Waani, F. J. (2019). Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 12(4), 1–18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25466>
- Insani, F. D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Iramdan, I., & Lengsi, M. (2019). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(2), 88–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2678137>
- Izmi, A. (2017). *Politik Kurikulum Di Indonesia*. Universitas Negeri Jakarta.
- Pasaribu, C. (2025). *Mengupas Tuntas Kurikulum 1947: Sejarah, Tantangan, dan Peluang*. PBG.CO.ID. <https://pbg.co.id/blog/mengupas-tuntas-kurikulum-1947-sejarah-tantangan-dan-peluang/>
- Prakoso, S. (2018). Perubahan Tema dan Perspektif dalam Historiografi Asia Tenggara, 1955-2010. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(2), 31–66. <https://doi.org/10.21009/jps.072.03>
- Raharjo, T. (2025). *RIWAYAT KURIKULUM DARI ZAMAN KE ZAMAN, REZIM KE REZIM*. Salam: Sanggar Anak Alam. <https://www.salamyogyakarta.com/riwayat-kurikulum-dari-zaman-ke-zaman-rezim-ke-rezim/>
- Rosser, A., King, P., & Widoyoko, D. (2022). The Political Economy of the Crisis in Indonesia. *RISE: Political Economy Paper*.
- Safitri, R. W., & Purwaningsih, S. M. (2016). KURIKULUM NASIONAL MATA PELAJARAN SEJARAH MASA ORDE BARU TAHUN 1968- 1998. *E-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 644–655.
- Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 365. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1250>
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19–34.
- Sumardin, O., & Henri, H. (2024). Pentingnya Pendidikan Sejarah Dalam Pembentukan Identitas Bangsa. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 27–33.
- Susilo, A., Budi, Y., Kuwoto, M. A., & Purwata, H. (2025). PENTINGNYA KESADARAN SEJARAH DALAM MEMBANGUN IDENTITAS DAN KARAKTER BANGSA. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.36805/manajemen.v4i1.377>
- Utami, S. D. U., Nuraryadi, M. R., & Almauqy, M. F. F. (2024). Transformasi Dan Pengaruh Kebijakan Pendidikan Pada Masa Orde Baru Di Indonesia. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 3(1).
- Wahyuni, F. (2015). KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya*, 10(2), 231–242. <https://doi.org/10.1023/A:1013199923212>
- Yuliana, T., & Maysaroh, S. (2024). Peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan: sistematik rewiu. *Adi Karsa : Jurnal Teknologi Komunikasi Pendidikan*, 15(1), 91–99. <https://doi.org/10.51169/adikarsa.v15i2.93>
- Zulkarnain. (2020). Hegemoni Ideologi Penguasa Terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(02), 1–11. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.4975>

